



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 281 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA OELETSALA DAN DESA BAUMATA UTARA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 66/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Utara, Desa Oelnasi, Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat lahan dalam Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang merupakan kawasan hutan yang telah dikuasai dan digunakan masyarakat sehingga proses penyediaan tanah untuk pembangunan Bendungan Manikin dilakukan dalam bentuk penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Gubernur menetapkan susunan keanggotaan Tim Terpadu dan Sekretariat untuk setiap kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Dan Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat : ...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur, Desa Oeletsala Dan Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. persiapan;
  - b. pendataan, verifikasi dan validasi atas masyarakat yang menguasai tanah;
  - c. penetapan penilai;
  - d. pemberian santunan atau realokasi realokasi, penitipan uang santunan; dan
  - e. pendokumentasian serta pengadministrasian.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.

**KELIMA : ...**

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Dirjen. Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 281 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 02 Agustus 2023

**TENTANG PENGARAH TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA OELETSALA DAN DESA BAUMATA UTARA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | NAMA/JABATAN                                 | KEDUDUKAN |
|----|--|-----------|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur                 | Pengarah  |
| 2. | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur           |           |
| 3. | Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur  |           |
| 4. | Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur |           |
| 5. | Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang        |           |
| 6. | Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang     |           |

R GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

R **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 281 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023**

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR, DESA OELETSALA DAN DESA BAUMATA UTARA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| <b>No</b> | <b>Nama/Jabatan</b>  | <b>Kedudukan</b> |
|-----------|--|------------------|
| 1         | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Ketua            |
| 2         | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Anggota          |
| 3         | Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur   |                  |
| 4         | Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT  |                  |
| 5         | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang  |                  |
| 6         | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur   |                  |
| 7         | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur  |                  |
| 8         | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  |                  |
| 9         | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur  |                  |
| 10        | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kupang   |                  |
| 11        | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kupang   |                  |
| 12        | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kupang   |                  |
| 13        | Kepala Kepolisian Resort Kupang  |                  |
| 14        | Komandan Distrik Militer 1604/Kupang   |                  |
| 15        | Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT |                  |

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| 16. | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang  | Anggota |
| 17. | Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kanwil BPN Prov. NTT   |         |
| 18. | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PUPR Prov. NTT   |         |
| 19. | Kepala Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov. NTT   |         |
| 20. | Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI                                     |         |
| 21. | Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  |         |
| 22. | Kepala Seksi Pelaksanaan pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI  |         |
| 23. | Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan I pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI                        |         |
| 24. | Bernad S. P. Malelak, SH /Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI    |         |
| 25. | Arif Rahmad Darmawan, ST., MT/ Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Bendungan II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI |         |
| 26. | Hendry A. Amtiran, SH/Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI                 |         |
| 27. | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT              |         |
| 28. | Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  |         |
| 29. | Shahab Alkatiri, A. Md.T/Staf Pengadaan Tanah pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI                     |         |
| 30. | Camat Taebenu   |         |
| 31. | Camat Kupang Tengah   |         |
| 32. | Camat Amarasi Barat   |         |
| 33. | Kepala Desa Bokong  |         |
| 34. | Kepala Desa Kuaklako  |         |

|                    |   |             |
|--------------------|---|-------------|
| 35                 | Kepala Desa Oeletsala   | Anggota     |
| 36                 | Kepala Desa Baumata Timur   |             |
| 37                 | Kepala Desa Baumata Utara   |             |
| 38                 | Kepala Desa Oelnasi   |             |
| 39                 | Kepala Desa Oelpuah   |             |
| 40                 | Kepala Desa Soba  |             |
| <b>SEKRETARIAT</b> |   |             |
| 1.                 | Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT  | Koordinator |
| 2.                 | Lily M. D Un Taolin/Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT   | Anggota     |
| 3.                 | Dico Nasrulloh, ST., M.Eng/Pelaksana Teknik pada Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI |             |
| 4.                 | Bernadus Wejo, Amd.T/ Staf Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI                |             |

RE GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,

RE VIKTOR BUNGILU LAISKODAT